



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 29 /DISKOMINFO/TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN PENGADUAN
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tepat, tuntas dan terkoordinasi dengan baik, maka perlu menunjuk Petugas Administrator Pengelolaan Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 18);
24. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Administrator Pengelola Penanganan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Pengaduan Organisasi Penyelenggara Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Administrator Pengelola Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N dilevel Nasional untuk ditindak lanjuti sebagai tindaklanjut monitoring opini dan aspirasi publik;
 - b. pengelola penanganan pengaduan menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggara selaku Pejabat Penghubung di satuan kerja berdasarkan kategori pengaduan untuk ditindaklanjuti;
 - c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan organisasi penyelenggara;
 - d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
 - e. menyalurkan pengaduan kepada koordinasi pengelolaan pengaduan Nasional LAPOR!-SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya; dan

- f. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pengaduan, baik secara triwulan, semesteran ataupun tahunan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Bupati.

KETIGA : Petugas Administrator Pengelola Pengaduan Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPORI-SP4N di level Daerah/Kabupaten untuk ditindak lanjuti sebagai tindak lanjut monitoring opini dan aspirasi publik;
- b. pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggara selaku Pejabat Penghubung di satuan kerja menindaklanjuti berdasarkan kategori pengaduan;
- c. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan organisasi penyelenggara;
- d. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan;
- e. menyalurkan pengaduan kepada koordinasi pengelolaan pengaduan Nasional LAPORI-SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan pengaduan, baik secara triwulan, semesteran ataupun tahunan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang selaku Anggota Tim Koordinasi Pejabat Penghubung Pengelolaan Pengaduan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang pada masing-masing Perangkat Daerah atau Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI BENGKAYANG,


SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 23 /DISKOMINFO/TAHUN 2024
TANGGAL : 9 Januari 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN
PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN
PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL.RUANG	PERANGKAT DAERAH/ BADAN PUBLIK/ UNIT KERJA	JABATAN POKOK
1	2	3	4
1.	IWAN SURYADI, SE NIP. 19770602 200502 1 004 Penata/ III.c	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang
2.	IBNU CHAEDAR, S.S NIP. 19940408 202203 1 006 Penata Muda/ III.a	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG,


SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 29 /DISKOMINFO/TAHUN 2024
 TANGGAL : 4 Januari 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN
 PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
 RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
 PUBLIK NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLA PENGADUAN ORGANISASI
 PENYELENGGARA PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN ASPIRASI DAN
 PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN
 PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOL.RUANG	PERANGKAT DAERAH/ BADAN PUBLIK/ UNIT KERJA	JABATAN POKOK
1	2	3	4
1.	NOPRIANUS HENDRO, S.IP NIP. - -	Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Bengkayang	Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan SETDA Kabupaten Bengkayang
2.	SELVIA ENDANG NIP.- -	Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bengkayang	Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum SETDA Kabupaten Bengkayang
3.	DARMAWAN NIP.- -	Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Bengkayang	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kabupaten Bengkayang
4.	KAROLINA R.DULI, SE NIP.19791222 200604 2 008 Penata Tk.I/ III-d	Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kabupaten Bengkayang	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam SETDA Kabupaten Bengkayang
5.	YUNITA NORMASARI, S.STP NIP.19940710 201609 2 001 Penata Muda Tk.I/ III-b	Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Bengkayang	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Bengkayang
6.	ADRIANUS NATAL, SH NIP. 19821223 201503 1 003 Penata Muda Tk.I/ III-b	Bagian Umum SETDA Kabupaten Bengkayang	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian pada Bagian Umum SETDA Kabupaten Bengkayang
7.	ROBERTUS, S.Kom NIP.19850912 201101 1 002 Penata/ III-c	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA Kabupaten Bengkayang	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan SETDA Kabupaten Bengkayang
8.	PETRUS, A.Md NIP.- -	Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Bengkayang	Pengelola Data pada Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Bengkayang
9.	MEICYE FRISKA, S.Tr.A.P NIP.19950320 202012 2 010 Penata Muda/ III-a	Bagian Pengadaan Barang/Jasa SETDA Kab.Bengkayang	Analisis Klasifikasi Barang pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Bengkayang
10.	JULIANI, SE NIP.19810707 201101 2 005 Penata/ III-c	Bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA Kab.Bengkayang	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA Kabupaten Bengkayang
11.	DEMI ALO SINULINGGA, S.Tr.IP NIP.19980508 202208 1 001 Penata Muda/ III-a	Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Penelaah Teknis Kebijakan pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang
12.	NAWIN NIP.19780207 201407 1 001 Juru/ I-c	Inspektorat Kabupaten Bengkayang	Pengelola Data dan Informasi pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang
13.	KARTOBING NIP. 19840912 201407 1 004 Pengatur Tk.I/ II-b	Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang	Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang
14.	HENI KRISTINA, A.Md NIP. - -	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang

15.	CORNELIUS BONOMEUS,SH NIP.19790907 200701 1 026 Penata/ III-c	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkayang	Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkayang
16.	DEDI KRISTIANUS, SE NIP.19810213 201407 1 002 Penata Muda Tk.I/ III-b	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang	Analisis Sistem Jaringan Jalan/ Jembatan pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkayang
17.	KRISTOYO, SE NIP.19820612 200312 1 005 Penata Muda/ III-a	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang	Pengawas Pupuk dan Pestisida pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bengkayang
18.	VINCENSIUS ADRIADI, A.Md NIP.19841020 201101 1 003 Pengatur Tk.I/ II-d	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang	Pengelola Data pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang
19.	ANDRI IRMA SETIAWAN S.Sos NIP.19860808 202012 1 005 Penata Muda/ III-a	Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang	Analisis Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkayang
20.	IKE NURJANA, S.Par NIP.19971103 202012 2 009 Penata Muda/ III-a	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang	Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab.Bengkayang
21.	BONI MERCIANUS HIA, S.Kom NIP.19860529 201902 1 001 Penata Muda Tk.I/ III-b	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang	Analisis Jabatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang
22.	AGNES SEPRYANTI, A.Md NIP.19850926 201101 2004 Pengatur Tk.I/ II-d	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bengkayang	Pengolah Data Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bengkayang
23.	ARIE WIJAYA, ST NIP.19900210 202203 1 003 Penata Muda/ III-a	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang	Pelaksana Pengawas Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Bengkayang
24.	A. PANJI BURLIANSYAH, A.Ma.PKB NIP.19970816 202203 1 005 Pengatur Muda Tk.I/ II-b	Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang	Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang
25.	M.HEPIANTO, S.ST NIP. 19790917 200903 1 002 Penata Tk.I/ III-d	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Bengkayang	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan LH Kabupaten Bengkayang
26.	HERY E, S.I.Pust NIP.19910913 202203 1 004 Penata Muda/ III-a	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkayang	Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bengkayang
27.	JAN BERTUAHDIN DAMANIK, S.A.P NIP.19720604 200604 1 021 Penata Muda/ III-a	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang	Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang
28.	ELI MARYANTO, S.A.P NIP.19710908 200003 1 004 Penata/ III-c	Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang
29.	RASIS MULYAWAN NIP.19880924 202203 1 003 Pengatur Muda/ II-a	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang	Polisi Pamong Praja Pemula pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkayang
30.	EMIL CANS, S.STP, M.Si NIP. 19831119 200212 1 001 Pembina Tk.I/ IV-b	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang	Sekretaris pada BAPPEDA Kabupaten Bengkayang
31.	ALEK SANDRO, SE NIP.19850608 201001 1 015 Penata Tk.I/ III-d	Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Bengkayang	Kasubbag Adum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan PSDM Kabupaten Bengkayang
32.	HATARI NIP.19780810 200604 1 007 Pengatur/ II-c	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang	Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang
33.	HENDRIKUS THOMAS, S.Sos NIP.19950602 202203 1 012 Penata Muda/ III-a	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang	Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bengkayang
34.	JUNITA, SM NIP.19820805 201504 2 001 Penata/ III-c	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang	Analisis Rencana Kerja dan Kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang
35.	ADEN NIP.19740722 200604 1 004 Penata Muda/ III-a	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang	Pengadministrasi Kepegawaian pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Bengkayang

36.	FERDIAN TRIANTO, S.IP NIP.19870325 200701 1 002 Penata Tk.1/ III-d	Kecamatan Bengkayang	Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Bengkayang
37.	TEDDY MISWAR, S.IP.,M.Sos NIP.19780721 200902 1 001 Pembina/ IV-a	Kecamatan Sungai Betung	Sekretaris pada Kecamatan Sungai Betung
38.	GREGORIUS MAURIED, A.Md NIP.19850714 201101 1 003 Penata Muda/ III-a	Kecamatan Lembah Bawang	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Kec.Lembah Bawang
39.	TRI RAMAYANA, SP NIP.19860517 201407 1 003 Pengatur/II-c	Kecamatan Samalantan	Pelaksana pada Kecamatan Samalantan
40.	KUSNAN A, S.KM NIP.19730711 199603 1 001 Pembina/ IV-a	Kecamatan Monterdo	Sekretaris pada Kecamatan Monterado
41.	SUPARJO, SE NIP.19841105 200502 1 002 Penata Muda Tk.1/ III-b	Kecamatan Capkala	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Capkala
42.	MARIA YESSIONI OLLA, A.Md NIP.19800619 201001 2 009 Penata Muda/ III-a	Kecamatan Sungai Raya	Pengelola Data pada Kecamatan Sungai Raya
43.	RAVIAN NIP.- -	Kecamatan Sungai Raya Kepulauan	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Kecamatan Sungai Raya Kepulauan
44.	LIBERTUS HERMANTO, SE NIP.19730909 200902 1 001 Penata Muda Tk.1/ III-b	Kecamatan Teriak	Kasubbag Program, Keuangan dan Aset pada Kecamatan Teriak
45.	MARKUS, SP NIP.19801106 200701 1 013 Penata Muda Tk.1/ III-b	Kecamatan Lumar	Kasubbag Adum dan Kepegawaian pada Kecamatan Lumar
46.	NURDIN NIP.19750815 200906 1 003 Pengatur/ II-c	Kecamatan Ledo	Pelaksana pada Kecamatan Ledo
47.	RIYANTO, A.Md NIP.19690917 199003 1 008 Penata Tk.1/ III-d	Kecamatan Sanggau Ledo	Kepala Seksi Trantib pada Kecamatan Sanggau Ledo
48.	YUNUS, SE NIP.19781008 200212 1 005 Penata/ III-c	Kecamatan Seluas	Kasi Pemerintahan pada Kecamatan Seluas
49.	VIKTORIANUS, SE NIP.19820806 201001 010 Penata/ III-c	Kecamatan Tujuh Belas	Kasi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Tujuh Belas
50.	SUNARTO, SH.,MH NIP.19750926 200701 1 006 Penata Tk.1/ III-d	Kecamatan Jagoi Babang	Sekretaris Camat pada Kecamatan Jagoi Babang
51.	KUNDEDIKTUS NOPILA, S.IP NIP.19811116 201101 1 005 Penata Tk.1/ III-c	Kecamatan Siding	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Siding
52.	APEN, SKM.,M.AP NIP.19660507 199303 1 011 Pembina/ IV-a	Kecamatan Suti Semarang	Sekretaris pada Kecamatan Suti Semarang
53.	DONY NIP.19800814 200502 1 003 Penata Muda/ III-a	Pelaksana pada Kelurahan Bumi Emas	DONY NIP.19800814 200502 1 003 Penata Muda/ III-a
54.	IMUS, A.Md NIP.19780705 201101 1 005 Penata Muda/ III-a	Kelurahan Sebalu	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan Sebalu
55.	LEONIE SARAH HILDEGARDIS TIRUS, S.Psi, M.Psi, Psikolog NIP. 19940810 202203 2 009 Penata Muda Tk.1/ III-b	RSUD Bengkayang	Ahli Pertama Psikolog Klinis pada RSUD Bengkayang
56.	MARKUS JONI NIP.- -	PDAM Tirta Bengkayang	Pengadministrasi pada Perumda Air Minum Tirta Bengkayang

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS